



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
UNIT KERJA : SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ALI MAULANA HAKIM
2. Jabatan : WAKIL WALIKOTA
3. NHK : 45515

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.479.060.000

1. Tanah Seluas 100 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 105.200.000
2. Tanah Seluas 130 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 135.160.000
3. Tanah Seluas 100 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 105.200.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 202 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.108.500.000
5. Tanah Seluas 250 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 269.800.000

1. MOBIL, HONDA MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
2. LAINNYA, PATROL 671 Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 33.000.000
3. LAINNYA, PATROL 472 FRAME MERAH HITAM Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 16.500.000
4. LAINNYA, MARZZOCHI BIRU METALIK Tahun 1996, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
5. LAINNYA, GIANT FRAME HITAM BIRU Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 22.000.000

6. LAINNYA, KREUZZ LIPAT Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000

7. LAINNYA, UNITED DOMINATE Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 1.800.000

8. LAINNYA, BROMPTON LIMITED EDITION Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 17.626.320

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 1.766.486.320

III. HUTANG Rp. 697.624.178

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.068.862.142

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

